

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

Ungkap Dana KJP Mengendap

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail membeberkan penyebab utama mengendapnya dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Bank DKI.

Menurutnya, dana tersebut terlambat lantaran Bank DKI tidak menerima daftar penerima data KJP dengan tepat waktu.

"Bank DKI hanya menunggu feeding data dari pihak Pemprov DKI Jakarta untuk para penerima KJP," ucap Ismail saat ditemui di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (5/7).

Ismail menyalahkan Pemprov DKI yang bertanggung jawab menetapkan sasaran penerima KJP, sebelum diserahkan kepada Bank DKI untuk pencairannya.

"Mekanisme dalam pencairan bank DKI tidak mungkin langsung mencairkan ketika tidak ada perintah pencairan. Perintah pencairan ini yang menjadi dasar dia mentransfer ke rekening masing-masing calon penerima tersebut," kata Ismail.

Berdasarkan penjelasan Pemprov DKI, terdapat beberapa siswa penerima KJP yang tak lagi layak untuk mendapat bantuan dalam hasil verifikasi dan validasi.

Temuan tersebut seperti alamat tempat tinggal tidak sesuai dan memiliki kendaraan bermotor dalam jumlah tertentu. Hal ini menimbulkan keterlambatan penetapan daftar penerima KJP, sehingga Bank DKI tidak bisa mengeksekusi pencairan dana yang mengendap tersebut.

Adapun keterlambatan pemberian data tersebut terjadi lantaran pihak Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta tengah memeriksa identitas warga yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Identitas diperiksa guna memastikan para penerima DTKS masih sesuai dengan kriteria penerima bantuan.

"Misalkan dia sudah memiliki kendaraan bermotor dalam jumlah tertentu yang perlu satu tindakan validasi dari Pemprov DKI Jakarta," ucap Ismail.

Dengan begitu, Ismail meminta Pemprov DKI Jakarta lebih selektif menyeleksi penerima KJP agar bantuan tersebut tepat sasaran. Daftar bantuan tersebut juga harus diberikan tepat waktu agar Bank DKI bisa menyalurkan bantuan uang ke pemegang KJP. (m27)



Yolanda Putri Dewanti